



Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

The Influence of Government Expenditure, Open Unemployment Rate (TPT), and Unemployment on Poverty in North Sumatra Province

Eva Ulina Br Hombing¹, Joko suhariato²

Universitas Negeri Medan

Email: evaulina855@gmail.com¹, djoko@unimed.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 18-03-2025

Revised : 20-03-2025

Accepted : 22-03-2025

Published: 24-03-2025

Abstract

This study aims to analyze the effect of government spending, the Open Unemployment Rate (TPT), and unemployment on poverty in North Sumatra Province. Poverty is a major challenge to economic development that is influenced by various structural factors, including limited public access to employment, government spending, and unemployment rates. This study uses secondary data obtained from the publication of the Central Statistics Agency (BPS) of North Sumatra Province during the period 2001 to 2020. The analysis method used is multiple linear regression to determine the simultaneous and partial relationship between these variables and the poverty rate. What is interesting and underlies the importance of testing in this study is the still high poverty rate in North Sumatra Province, even though local government spending and poverty alleviation programs continue to increase every year. In addition, the phenomenon where the decline in the unemployment rate is not always directly proportional to the decline in the poverty rate indicates a discrepancy that needs to be analyzed in more depth. Therefore, this study is relevant to further examine the relationship between government spending, TPT, and unemployment on poverty, in order to provide targeted policy recommendations. The results of the study show that partially, government spending has a negative and significant effect on poverty. This means that increasing government spending contributes to reducing poverty rates in North Sumatra Province. In addition, the open unemployment rate (TPT) also shows a negative and significant effect on poverty. This indicates that the decline in TPT plays an important role in reducing poverty. Overall unemployment, including disguised unemployment, has also been shown to have a negative and significant effect on poverty rates in this area. Simultaneously, the three variables government spending, TPT, and unemployment contribute significantly to poverty by 80.90% in North Sumatra Province, while the remaining 19.10% is influenced by other factors outside this study. The findings of this study are in line with the theory of economic development and the results of previous studies which emphasize that increasing targeted government spending, reducing the open unemployment rate, and reducing overall unemployment are important strategies in reducing poverty rates. Therefore, an integrated and sustainable policy is needed to increase labor absorption and optimize government spending in efforts to alleviate poverty in North Sumatra Province.

Keywords: *Government Spending, Open Unemployment Rate (TPT), Unemployment.*



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, termasuk keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, pengeluaran pemerintah, serta tingkat pengangguran. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2001 hingga 2020. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan simultan dan parsial antara variabel-variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan. Hal yang menarik dan mendasari pentingnya dilakukan pengujian dalam penelitian ini adalah masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, meskipun pengeluaran pemerintah daerah dan program penanggulangan kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, adanya fenomena di mana penurunan tingkat pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang perlu dianalisis lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji lebih lanjut hubungan antara pengeluaran pemerintah, TPT, dan pengangguran terhadap kemiskinan, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan TPT berperan penting dalam pengurangan kemiskinan. Pengangguran secara keseluruhan, termasuk pengangguran terselubung, juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah ini. Secara simultan, ketiga variabel tersebut pengeluaran pemerintah, TPT, dan pengangguran memberikan kontribusi yang signifikan sebesar 80,90% terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan sisanya 19,10% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi dan hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta pengurangan pengangguran secara keseluruhan merupakan strategi penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan optimalisasi pengeluaran pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: *Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pengangguran.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, yang sering dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, termasuk pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat pengangguran itu sendiri. Di Indonesia, kemiskinan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada distribusi kesejahteraan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.

Pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Menurut Bambang Brodjonegoro (2017), pengeluaran pemerintah yang efisien dalam sektor infrastruktur dan sosial dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Soedradjad Djiwandono (1995) menekankan bahwa pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran justru bisa memperburuk kemiskinan dengan menciptakan ketergantungan dan ketidakseimbangan. Joseph Stiglitz juga menekankan pentingnya pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan untuk mengurangi kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemiskinan. Emil Salim (1990) menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi, terutama di sektor informal, memperburuk kondisi kemiskinan karena pekerjaan yang tidak stabil dan pendapatan rendah. Sementara itu, Edi Suharto (2000) menyoroti rendahnya kualitas



pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sebagai salah satu faktor utama tingginya TPT di Indonesia, yang berkontribusi pada kemiskinan struktural. Sudirman (1993) juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi TPT dan kemiskinan.

Pengangguran itu sendiri berhubungan erat dengan kemiskinan. Sri Mulyani Indrawati (2007) berpendapat bahwa pengangguran di Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan pasar. A.A. Maramis (1996) menjelaskan bahwa ketidakmerataan pembangunan antar daerah memperburuk pengangguran, sementara Taufik M.S. (2008) menunjukkan bahwa ketidakcocokan antara jumlah lulusan dan lapangan pekerjaan di Indonesia meningkatkan pengangguran dan memperburuk kemiskinan, terutama di kalangan generasi muda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka, dan pengangguran terhadap kemiskinan, serta mengidentifikasi kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia.

Landasan Teori

Pengertian Pengeluaran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran merujuk pada jumlah uang yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok untuk membeli barang dan jasa. Dalam konteks yang lebih luas, pengeluaran ini mencakup semua bentuk pembayaran yang dilakukan, baik oleh rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi. BPS mengklasifikasikan pengeluaran dalam beberapa kategori, di antaranya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk investasi, dan pengeluaran pemerintah.

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan yang tinggi menyebabkan banyak rumah tangga dengan pendapatan rendah harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi barang-barang pokok, sementara mereka tidak dapat mengakses barang atau jasa yang meningkatkan kualitas hidup (seperti pendidikan, kesehatan, atau properti). Dengan demikian, semakin banyak pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang tidak bisa dihindari, semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan Prof. Dr. Syahril Manan (2007)

Menurut Keynes, pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian, terutama dalam periode resesi. Dalam situasi di mana sektor swasta mengurangi pengeluarannya, pengeluaran pemerintah dapat menggantikan peran tersebut untuk menjaga permintaan agregat agar tetap tinggi dan mencegah penurunan aktivitas ekonomi yang lebih dalam.

Salim (2009) dalam bukunya "Pengeluaran dan Ketimpangan Sosial" berpendapat bahwa pengeluaran, baik oleh rumah tangga maupun pemerintah, dapat memperburuk atau memperbaiki ketimpangan sosial dalam masyarakat. Menurut Salim, pengeluaran yang tidak terarah dengan baik atau tidak berfokus pada masyarakat miskin justru dapat memperburuk ketimpangan, sedangkan pengeluaran yang dirancang dengan tujuan untuk redistribusi kesejahteraan akan membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan taraf hidup mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Prof. Dr. M. Prijono (1996) Dalam penelitiannya, ia berpendapat bahwa pengeluaran rumah tangga, terutama untuk konsumsi yang bersifat dasar dan tidak produktif, berkontribusi pada terjebaknya keluarga dalam siklus kemiskinan. Pengeluaran yang tinggi untuk kebutuhan sehari-



hari tanpa disertai investasi dalam pendidikan atau usaha produktif membuat kemiskinan menjadi sulit diatasi. Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran rumah tangga meningkat, jika pengeluaran tersebut hanya untuk konsumsi sehari-hari tanpa peningkatan kapasitas ekonomi atau produktivitas, keluarga miskin tetap terjebak dalam kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan perilaku konsumsi dan lebih banyak investasi dalam hal yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke modal produktif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran

Pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek ekonomi, sosial, geografis, maupun kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Mengacu pada Hukum Wagner, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Sumut yang ditandai dengan peningkatan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata, kebutuhan atas pelayanan publik juga semakin meningkat. Hal ini mendorong pemerintah Provinsi Sumut untuk meningkatkan pengeluaran, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendekatan Keynesian menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut. Investasi pemerintah dalam proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta fasilitas publik lainnya diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat dan memperluas lapangan kerja di wilayah provinsi.

Faktor penting lain yang memengaruhi pengeluaran Provinsi Sumut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk sektor perkebunan, pertanian, dan pariwisata. Sumut memiliki potensi PAD yang cukup besar karena kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, seperti kelapa sawit, karet, kopi, serta potensi pariwisata Danau Toba. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah Provinsi Sumut memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk meningkatkan pengeluaran pembangunan. Di samping itu, transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), juga menjadi sumber penting untuk membiayai belanja daerah. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang besar dan tingkat urbanisasi yang tinggi, khususnya di Kota Medan sebagai pusat perekonomian provinsi, turut mendorong kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan layanan publik yang memadai.

Aspek geografis juga memainkan peran penting dalam pengeluaran pemerintah provinsi. Wilayah Sumut yang luas, terdiri dari dataran rendah, pegunungan, hingga daerah kepulauan, menuntut biaya lebih tinggi untuk pembangunan infrastruktur yang merata, terutama di wilayah terpencil seperti Nias dan Tapanuli. Selain itu, kebijakan prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sumut, seperti pengembangan kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba, mendorong peningkatan pengeluaran di sektor pariwisata, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah juga turut memengaruhi arah belanja pemerintah provinsi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, kebutuhan masyarakat yang beragam, prioritas pembangunan yang ditetapkan, serta tantangan geografis yang dihadapi provinsi ini.



Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator utama dalam analisis ketenagakerjaan di Indonesia. Secara umum, pengangguran terbuka didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja secara aktif mencari pekerjaan, namun hingga periode tertentu belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau belum diterima di dunia kerja. Dalam konteks Indonesia, definisi resmi TPT merujuk pada penjelasan yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS (2023), Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan proporsi tenaga kerja yang sedang tidak bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Definisi ini berfungsi sebagai dasar dalam pengukuran jumlah penganggur terbuka di Indonesia, yang menjadi salah satu parameter penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI), dalam penelitian Adiwibowo (2019) yang berjudul *"Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia"*, menegaskan adanya hubungan kausal yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada tingkat pengangguran terbuka meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,5% di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel antar-provinsi dan menunjukkan bahwa wilayah dengan TPT tinggi cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi pula. Hasil penelitian Adiwibowo ini secara statistik menguatkan hipotesis hubungan pengangguran terbuka dengan kemiskinan yang telah banyak dikemukakan dalam teori pembangunan ekonomi.

TPT menjadi indikator penting karena mencerminkan tingkat efisiensi pasar tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi angka TPT, maka menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan. Tingginya TPT seringkali dikaitkan dengan persoalan struktural dalam perekonomian suatu daerah atau negara, seperti kurangnya diversifikasi sektor industri, keterbatasan investasi, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta lemahnya kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, banyak ahli Indonesia yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, misalnya dengan mendorong pembangunan sektor-sektor produktif, memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, serta memperluas investasi di berbagai sektor, khususnya sektor padat karya.

Dalam konteks daerah, termasuk Provinsi Sumatera Utara, pengangguran terbuka menjadi tantangan yang kompleks. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap, terutama di wilayah urban seperti Medan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dalam menciptakan lapangan kerja baru. Menurut data BPS Sumatera Utara tahun 2023, TPT di provinsi tersebut mencapai angka yang cukup signifikan, yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk usia kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor-sektor utama. Banyak ahli daerah menyebutkan bahwa faktor pendidikan, keterampilan, serta koneksi antara dunia pendidikan dan industri masih menjadi persoalan utama dalam menurunkan TPT di provinsi ini.

Penyebab Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sejumlah ahli ekonomi Indonesia telah mengkaji penyebab



tingginya TPT, baik dari faktor struktural, demografis, hingga faktor kebijakan pemerintah. Pengangguran terbuka bukan hanya sekadar angka statistik yang menunjukkan jumlah orang yang tidak bekerja, melainkan mencerminkan kompleksitas persoalan dalam dinamika pasar tenaga kerja, kualitas pendidikan, pembangunan industri, serta perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Berikut adalah uraian mendalam mengenai penyebab TPT menurut teori dan pandangan para ahli ekonomi Indonesia.

Salah satu penyebab utama TPT di Indonesia, menurut Sadono Sukirno, adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Sukirno menjelaskan bahwa setiap tahun jumlah penduduk usia kerja di Indonesia terus meningkat, sementara kesempatan kerja yang tersedia tidak mampu mengimbangi pertambahan tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar tenaga kerja tidak terserap ke dalam dunia kerja formal. Sadono Sukirno juga menyoroti bahwa dalam perekonomian negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan sektor informal seringkali tidak diiringi oleh peningkatan sektor formal, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap ke sektor informal yang produktivitasnya rendah, atau bahkan tetap menganggur.

Dalam konteks regional, seperti di Provinsi Sumatera Utara, penyebab TPT juga mencerminkan persoalan-persoalan struktural yang terjadi secara nasional. Data BPS Sumut menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran terbuka di daerah ini disebabkan oleh ketimpangan pembangunan antarwilayah. Wilayah perkotaan seperti Medan dan Binjai cenderung lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, atau Kepulauan Nias. Akibatnya, terjadi arus migrasi besar-besaran dari desa ke kota, yang memperburuk masalah pengangguran di perkotaan karena kapasitas penyerapan tenaga kerja di kota tidak memadai. Hal ini selaras dengan teori migrasi Todaro, yang juga banyak dikaji dan diadopsi oleh ahli Indonesia. Teori ini menjelaskan bahwa urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan penumpukan tenaga kerja di kota tanpa diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai.

Indikator TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator penting dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja suatu negara, termasuk Indonesia. Pengukuran TPT tidak hanya menunjukkan jumlah pengangguran yang ada, tetapi juga mencerminkan efektivitas pembangunan ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan pemerintah. Di Indonesia, indikator TPT secara resmi diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Selain itu, sejumlah ahli ekonomi Indonesia juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan konsep dan indikator yang digunakan untuk mengukur TPT secara lebih komprehensif. Indikator ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan, program pembangunan, serta pengambilan keputusan dalam rangka mengatasi pengangguran terbuka di Indonesia.

Menurut BPS (2023), indikator utama dalam menghitung TPT adalah persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja dalam suatu periode tertentu. Angkatan kerja di sini mencakup semua orang yang berusia 15 tahun ke atas, yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Mereka yang termasuk kategori penganggur adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja sama sekali selama seminggu terakhir sebelum survei, dan secara aktif mencari pekerjaan atau sedang



mempersiapkan usaha baru. Pengertian ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO), namun telah disesuaikan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, TPT menunjukkan proporsi tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja, meskipun mereka aktif dan bersedia untuk bekerja.

Di tingkat provinsi, seperti di Sumatera Utara, indikator TPT diukur secara regional oleh BPS Provinsi Sumatera Utara. Data Sakernas menunjukkan bahwa wilayah perkotaan di Sumatera Utara, seperti Kota Medan dan Deli Serdang, cenderung memiliki TPT lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Hal ini sesuai dengan teori Todaro, yang menjelaskan bahwa migrasi dari desa ke kota tanpa diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja baru menyebabkan peningkatan pengangguran di kota. Oleh karena itu, indikator TPT di daerah harus dikaitkan dengan data migrasi penduduk serta distribusi sektor industri yang dominan.

Pengertian Pengangguran

Menurut Prathama dan Mandala (2008), Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja, sedangkan yang tidak mencari kerja, entah karena harus mengurus keluarga atau sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam *Laporan Profil Kemiskinan Indonesia 2023* juga menyebutkan bahwa provinsi dengan tingkat pengangguran yang tinggi, seperti Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara, cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi pula. BPS mencatat bahwa salah satu determinan utama kemiskinan adalah kehilangan pekerjaan atau ketiadaan pekerjaan yang layak. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa pengangguran merupakan faktor kunci yang mendorong seseorang masuk ke dalam kondisi miskin.

$$T.P = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran (*unemployment*) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2007). Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif sedang mencari kerja pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak memperoleh upah yang diinginkan (Sukirno, 2006).

Jenis-jenis Pengangguran

Dalam studi ekonomi makro yang lebih lanjut, pembahasan masalah pengangguran akan dilakukan lebih spesifik dan cermat. Misalnya, akan dibahas apakah pengangguran yang terjadi merupakan pengangguran sukarela (*voluntary unemployment*) atau pengangguran dukalara (*involuntary unemployment*). Pengangguran sukarela dan dukalara erat kaitannya dengan jenis-jenis pengangguran berikut ini (Prathama & Mandala, 2008) :

1. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)

Pngangguran jenis ini bersifat sementara dan terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Kesenjangan ini dapat berupa kesenjangan waktu, informasi,



ataupun karena kondisi geografis/atau jarak antara pencari kerja dan kesempatan (lowongan) kerja. Pengangguran friksional bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Di dalam proses mencari kerja yang lebih baik itu adakalanya mereka harus menganggur.

2. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)

Dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi dan atau teknologi produksi yang digunakan, menuntut persyaratan tenaga kerja yang juga makin tinggi.

3. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Misalnya, diluar musim tanam dan panen, petani umumnya menganggur, sampai menunggu musim tanam dan panen berikutnya. Dengan demikian, pengangguran ini terjadi untuk sementara waktu saja.

4. Pengangguran Siklis (*Cyclical Unemployment*)

Pengangguran siklis adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksi. Dalam pelaksanaannya berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja diberhentikan.

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sementara itu, Amartya Sen, meskipun bukan ahli dari Indonesia, pemikirannya banyak diadopsi oleh ekonom Indonesia, menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakbebasan seseorang untuk menentukan pilihan hidup akibat keterbatasan kapabilitas (capabilities) dan akses terhadap sumber daya.

Di Provinsi Sumatera Utara, kemiskinan sering diidentikkan dengan rendahnya akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan publik, infrastruktur, dan lapangan kerja yang layak. BPS Sumatera Utara melaporkan bahwa kemiskinan di provinsi ini banyak ditemukan di daerah terpencil seperti Kepulauan Nias dan Mandailing Natal, di mana masyarakatnya masih sulit mendapatkan pendidikan yang memadai, layanan kesehatan yang terjangkau, serta akses pasar bagi produk hasil pertanian dan perikanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Sumut juga bersifat multidimensional dan mencakup berbagai aspek kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam *Laporan Profil Kemiskinan Indonesia 2023* juga menyebutkan bahwa provinsi dengan tingkat pengangguran yang tinggi, seperti Jawa Barat, Banten,



dan Sumatera Utara, cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi pula. BPS mencatat bahwa salah satu determinan utama kemiskinan adalah kehilangan pekerjaan atau ketiadaan pekerjaan yang layak. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa pengangguran merupakan faktor kunci yang mendorong seseorang masuk ke dalam kondisi miskin.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk kedalam ruang lingkup ekonomi regional yang mengkaji tentang Pengaruh Pengeluaran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada Bulan februari 2025.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa profil Provinsi Sumatera Utara dan data mengenai perkembangan Pengeluaran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data Pengeluaran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Sumber data sekunder diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumen Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2016). Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan jurnal, skripsi dan buku-buku ilmiah. Dengan mengambil data penelitian dari badan pusat statistik (BPS)

Metode Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketiga variabel, maka digunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel dependen (variabel Y) berdasarkan nilai independen (variabel X) yang diketahui. Dengan menggunakan analisis regresi linier maka akan mengukur perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 2008):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = variabel terikat

X₁ = variabel bebas 1

X₂ = variabel bebas 2

X₃ = variabel bebas 3

α = Konstanta



$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

regresi e = Error

Untuk membuktikan hipotesis maka digunakan uji hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :

Uji Signifikan Individual (Uji Statistik t), Uji Secara Simultan (Uji Statistik F), Koefisien Determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN

Perkembangan Kemiskinan, Pengeluaran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020

Tahun	Miskin	Pengeluaran	TPT	Pengangguran
2001	1.913.040	916.20	9.09	229.212
2002	1.883.890	1021.30	6.74	355.504
2003	1.889.400	1352.00	7.71	404.117
2004	1.800.100	1501.50	13.75	758.092
2005	1.760.228	1830.60	10.98	636.980
2006	1.979.702	2184.70	11.51	632.049
2007	1.770.000	2560.70	10.10	571.334
2008	1.630.000	2967.30	9.10	554.539
2009	1.500.000	3444.56	8.45	532.427
2010	1.490.000	3666.70	7.43	491.806
2011	1.436.400	4611.47	6.37	402.120
2012	1.400.400	7633.63	6.20	379.980
2013	1.416.400	7260.47	6.53	412.200
2014	1.360.600	7808.56	6.23	390.710
2015	1.508.140	7959.17	6.71	428.794
2016	1.452.600	9476.42	5.84	371.680
2017	1.326.600	12518.86	5.60	377.288
2018	1.291.900	12563.39	5.56	396.027
2019	1.260.500	13440.32	5.41	382.438
2020	1.356.700	12653.60	6.91	507.805

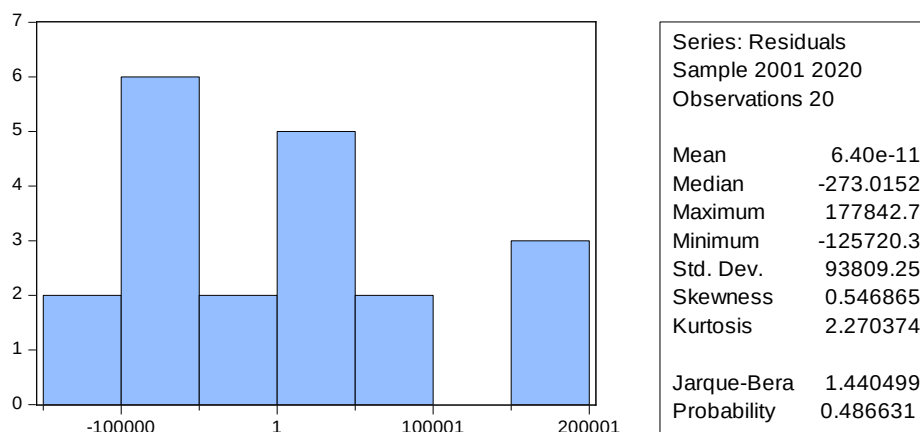
Perkembangan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Puncak angka kemiskinan terjadi pada tahun 2006 sebesar 1.979.702 jiwa, sementara angka terendah tercatat pada tahun 2019 sebesar 1.260.500 jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya dampak positif dari berbagai program pemerintah, meskipun pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali meningkat akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001, pengeluaran tercatat sebesar 916,20 miliar rupiah dan meningkat tajam hingga mencapai 12.653,60 miliar rupiah pada tahun 2020. Meskipun demikian, peningkatan pengeluaran ini belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara konsisten. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan jumlah pengangguran menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode tersebut. TPT menurun dari 9,09% pada tahun 2001 menjadi 6,91% pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah pengangguran meningkat dari 229.212 jiwa pada tahun 2001 menjadi 507.805 jiwa pada tahun 2020. Kenaikan pengangguran di tahun 2020 dipicu oleh dampak pandemi yang mengganggu stabilitas ketenagakerjaan di berbagai sektor ekonomi.



Keseluruhan data ini mencerminkan adanya hubungan yang kompleks antara pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan yang lebih tepat sasaran masih diperlukan agar pengeluaran pemerintah apat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Hasil Uji Asumsi Penelitian

a. Uji normalitas



Ho : Tidak terdapat pelanggaran uji normalitas data

Ha : terdapat pelanggaran uji normalitas data

Kriteria Uji Normalitas

Terima Ho, jika prob. *Jarque Bera* > 0,05. Artinya tidak terdapat pelanggaran pada uji normalitas di model penelitian.

Tolak Ho, jika prob. *Jarque Bera* < 0,05. Artinya terdapat pelanggaran pada uji normalitas di model penelitian.

Kesimpulan

Diketahui nilai **Probability Jarque-Bera** sebesar 0.486 (>0.05) maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau H0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran normalitas data dalam model penelitian ini.

b. Uji autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

	1.18310		
F-statistic	3	Prob. F(2,14)	0.3352
	2.89157		
Obs*R-squared	6	Prob. Chi-Square(2)	0.2356

Hipotesis Uji Autokorelasi

Ho : Tidak terdapat pelanggaran autokorelasi data

Ha : Terdapat pelanggaran autokorelasi data



Kriteria Uji Autokorelasi

Terima H_0 , jika prob. χ^2 square $> 0,05$. Artinya tidak terdapat pelanggaran autokorelasi pada model penelitian.

Tolak H_0 , jika prob. χ^2 square $< 0,05$. Artinya terdapat pelanggaran autokorelasi pada model penelitian.

Kesimpulan

Diketahui nilai **Probability Obs R-Squared** sebesar 0.2356 (>0.05) maka keputusan yang diambil adalah H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran autokorelasi data dalam model penelitian ini.

c. Uji heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

	2.54733		
F-statistic	6	Prob. F(3,16)	0.0924
	6.46477		
Obs*R-squared	2	Prob. Chi-Square(3)	0.0911
Scaled explained SS	2.62805		
	6	Prob. Chi-Square(3)	0.4526

Hipotesis Uji Heteroskedastisitas

H_0 : Tidak terdapat pelanggaran heteroskedastisitas data

H_a : Terdapat pelanggaran heteroskedastisitas data

Kriteria Uji Heteroskedastisitas

Terima H_0 , jika prob. χ^2 square $> 0,05$. Artinya tidak terdapat pelanggaran heteroskedastisitas pada model penelitian.

Tolak H_0 , jika prob. χ^2 square $< 0,05$. Artinya terdapat pelanggaran heteroskedastisitas pada model penelitian.

Kesimpulan

Diketahui nilai **Probability Obs R-Squared** sebesar 0.0911 (>0.05) maka keputusan yang diambil adalah H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran heteroskedastisitas data dalam model penelitian ini.

d. Uji multikolinearity

Variance Inflation Factors

Date: 02/08/25 Time: 22:02

Sample: 2001 2020

Included observations: 20

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.26E+10	43.2649	NA



	74.3521	7.51656	
PENGELUARAN	8	3	2.615800
	6.53E+0	82.5371	
TPT	8	8	6.233557
PENGANGGURAN	129194.	56.0705	
	0	4	3.579211

Hipotesis Uji Multikolinearity

Ho : Tidak terdapat pelanggaran multikolinearitas data

Ha : Terdapat pelanggaran multikolinearitas data

Kriteria Uji Multikolinearity

Terima Ho, jika nilai $VIF < 10$. Artinya tidak terdapat pelanggaran multikolinearitas pada model penelitian.

Tolak Ho, jika nilai $VIF > 10$. Artinya terdapat pelanggaran multikolinearitas pada model penelitian.

Kesimpulan

Nilai VIF variabel independen yang masuk kedalam model keseluruhan nilai *correlation* berada pada nilai yang lebih kecil daripada (<10.00) (nilai *correlation* <10.00) maka H0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran mutlikolinearity data dalam model penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya dilakukan tahap pengujian hipotesis model penelitian dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Dependent Variable: MISKIN

Method: Least Squares

Date: 02/08/25 Time: 21:34

Sample: 2001 2020

Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1540713.	150354.2	10.24723	0.0000
PENGELUARAN	-27.46932	8.622771	-3.185672	0.0057
TPT	72972.96	25563.09	2.854622	0.0115
PENGANGGURAN	-820.7599	359.4356	-2.283468	0.0364
R-squared	0.839167	Mean dependent var	1571330.	
Adjusted R-squared	0.809011	S.D. dependent var	233914.8	
S.E. of regression	102226.3	Akaike info criterion	26.08462	
Sum squared resid	1.67E+11	Schwarz criterion	26.28377	
Log likelihood	-256.8462	Hannan-Quinn criter.	26.12350	
F-statistic	27.82731	Durbin-Watson stat	1.338316	
Prob(F-statistic)	0.000001			



Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Uji Hipotesis Parsial

Hipotesis 1

Ha: Diduga terdapat pengaruh negatif signifikan antara variable pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan.

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara variable pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan.

Hipotesis 2

Ha: Diduga terdapat pengaruh negatif signifikan antara variable TPT dengan kemiskinan.

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara variable TPT dengan kemiskinan.

Hipotesis 3

Ha: Diduga terdapat pengaruh negatif signifikan antara variable pengangguran dengan kemiskinan.

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara variable pengangguran dengan kemiskinan.

Kriteria Uji Hipotesis Parsial

Terima Ho, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan atau $prob. > 0,05$ pada uji satu arah. Artinya tidak terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

Tolak Ho, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau $prob. < 0,05$ pada uji satu arah. Artinya terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

Nilai T Tabel Uji Hipotesis Parsial

Nilai t tabel pada penelitian kali ini adalah $n = 21$; $df = n - k - 1 = 21 - 3 - 1 = 17$; dengan taraf signifikansi $\alpha 0,05$; satu arah, maka didapat nilai t tabel sebesar 1,73961

Kesimpulan

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- Variabel pengeluaran t_{hitung} sebesar $3.185672 > t_{tabel (0.05;16)}$ sebesar 1,73961 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0057 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengeluaran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- Variabel tpt t_{hitung} sebesar $2.854622 > t_{tabel (0.05;16)}$ sebesar 1,73961 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0115 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan tpt terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- Variabel pengangguran t_{hitung} sebesar $2.283468 > t_{tabel (0.05;16)}$ sebesar 1,73961 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0364 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.



2. Uji Hipotesis Simultan

Hipotesis Uji Simultan (H_0 dan H_a)

H_a : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara variable pengeluaran, tpt, pengangguran dengan kemiskinan.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara variable pengeluaran, tpt, pengangguran dengan kemiskinan.

Kriteria Uji Hipotesis Simultan

Terima H_0 , jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan atau $prob. > 0,05$. Artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependen*.

Tolak H_0 , jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan atau $prob. < 0,05$. Artinya secara simultan terdapat pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependen*.

Kesimpulan

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar $27.82731 > F_{tabel} (0.05;3;16)$ sebesar 3,24 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan pengeluaran, tpt dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

3. Koefisien Determinasi

Makna nilai R adjusted square

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R adjusted-Square sebesar 0.8090. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Pengeluaran, TPT, dan Pengangguran memberikan kontribusi sebesar 80,90% terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, sisanya 19,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Terhadap Kemiskinan

Variabel pengeluaran t_{hitung} sebesar $3.185672 > t_{tabel} (0.05;16)$ sebesar 1,73961 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0057 < 0.05$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengeluaran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis yang mengkaitkan pengeluaran dengan kemiskinan teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya Prof. Dr. M. Prijono (1996). Dalam penelitiannya, ia berpendapat bahwa pengeluaran rumah tangga, terutama untuk konsumsi yang bersifat dasar dan tidak produktif, berkontribusi pada terjebaknya keluarga dalam siklus kemiskinan. Pengeluaran yang tinggi untuk kebutuhan sehari-hari tanpa disertai investasi dalam pendidikan atau usaha produktif membuat kemiskinan menjadi sulit diatasi.

Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran rumah tangga meningkat, jika pengeluaran tersebut hanya untuk konsumsi sehari-hari tanpa peningkatan kapasitas ekonomi atau produktivitas, keluarga miskin tetap terjebak dalam kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan perilaku konsumsi dan lebih banyak investasi dalam hal yang dapat meningkatkan



pendapatan rumah tangga, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke modal produktif.

Pengaruh TPT Terhadap Kemiskinan

Variabel t_{hitung} sebesar $2.854622 > t_{tabel (0.05;16)}$ sebesar 1,73961 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0115 < 0.05$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan TPT terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis yang mengkaitkan TPT dengan kemiskinan teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya Dr. Agus Sartono (2001) menjelaskan bahwa pengangguran secara langsung mempengaruhi kemiskinan. Ketika tingkat pengangguran tinggi, maka semakin banyak individu yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Ini menyebabkan mereka terjebak dalam kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang sulit untuk diatasi tanpa adanya peluang pekerjaan atau peningkatan keterampilan.

Berdasarkan teori Dr. Agus Sartono, TPT yang tinggi mengarah pada peningkatan kemiskinan karena pengangguran menghambat akses masyarakat terhadap pendapatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI), dalam penelitian Adiwibowo (2019) yang berjudul "*Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia*", menegaskan adanya hubungan kausal yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada tingkat pengangguran terbuka meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,5% di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel antar-provinsi dan menunjukkan bahwa wilayah dengan TPT tinggi cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi pula. Hasil penelitian Adiwibowo ini secara statistik menguatkan hipotesis hubungan pengangguran terbuka dengan kemiskinan yang telah banyak dikemukakan dalam teori pembangunan ekonomi.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Variabel pengangguran t_{hitung} sebesar $2.283468 > t_{tabel (0.05;16)}$ sebesar 1,73961 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0364 < 0.05$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis yang mengkaitkan pengangguran dengan kemiskinan teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam *Laporan Profil Kemiskinan Indonesia 2023* juga menyebutkan bahwa provinsi dengan tingkat pengangguran yang tinggi, seperti Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara, cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi pula. BPS mencatat bahwa salah satu determinan utama kemiskinan adalah kehilangan pekerjaan atau ketiadaan pekerjaan yang layak. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa pengangguran merupakan faktor kunci yang mendorong seseorang masuk ke dalam kondisi miskin.

Pengaruh Pengeluaran, TPT, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Pada pengujian hipotesis simultan menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar $27.82731 > t_{tabel (0.05;3;17)}$ sebesar 3,20 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0.05$, maka H_0 ditolak artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan pengeluaran, tpt, pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis yang mengkaitkan pengeluaran,



tpt, pengangguran dengan kemiskinan teruji kebenarannya.

Nilai R *adjusted-Square* dalam penelitian ini sebesar 0.8090. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu pengeluaran, tpt, pengangguran memberikan kontribusi sebesar 80,90% terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, sisanya 19,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan pengangguran secara umum merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Ketiga variabel ini memiliki peran yang saling berkaitan dan signifikan secara simultan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Pengeluaran rumah tangga mencerminkan daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Semakin rendah tingkat pengeluaran rumah tangga, semakin besar kemungkinan rumah tangga tersebut hidup dalam kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum yang diperlukan untuk hidup layak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di sisi lain, mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari kerja. Semakin tinggi TPT, semakin banyak individu yang kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan tetap, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Pengangguran secara umum, termasuk pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, mencerminkan ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap seluruh angkatan kerja produktif. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan rumah tangga dan memperbesar jumlah penduduk miskin.

Ketika ketiga faktor ini berjalan secara tidak seimbang pengeluaran pemerintah, TPT tinggi, dan pengangguran meluas akan menciptakan kondisi ekonomi yang tidak kondusif bagi penurunan angka kemiskinan. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah meningkat karena adanya lapangan kerja yang memadai dan penurunan tingkat pengangguran, maka tingkat kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Pengeluaran yang tinggi mencerminkan daya beli yang kuat, penurunan TPT menunjukkan efektifnya penyerapan tenaga kerja, dan rendahnya angka pengangguran menjadi indikator kestabilan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara peningkatan pengeluaran pemerintah, penurunan TPT, dan pengurangan pengangguran secara keseluruhan menjadi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengeluaran kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan tpt terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan pengeluaran, tpt, pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Sumatera Utara Dalam Angka 2019*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Boediono. 1981. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Dewi, Ayu Kartika dan Wahyudi Kumorotomo. 2015. "Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15 No. 2, hal. 111-122.
- Irawan, Prijono dan Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Mubyarto. 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nizar, Cholid. 2014. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Tambunan, Tulus. 2016. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widodo. 2006. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Yuliani, Rika dan Yunita Ariani. 2020. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 18 No. 2, hal. 152-161.